



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG METEOROLOGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUSWANTO
2. Jabatan : DEPUTI
3. NHK : 523646

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 57 m²/114 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m²/116 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/80 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m²/60 m² di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
7. Tanah Seluas 144 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 100.250.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, NISSAN XTRAIL 2.0 MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000



3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.500.000		
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
1.500.000		
5. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
2.000.000		
6. MOTOR, HONDA NEW BEAT CBS Tahun 2022, HASIL SENDIRI		
Rp. 17.250.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	18.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	347.721.743
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.065.971.743
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.065.971.743

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.